

KUDETA YANG (DIRANCANG) GAGAL DAN KONSOLIDASI REZIM (NEO) ATATURK? HIZMET GULEN, PARALEL STATE, DAN AMBISI TERSELUBUNG ERDOGAN

COUP D'ETAT THAT (DESIGNED TO) FAIL AND (NEO) ATATURK'S REGIME CONSOLIDATION? HIZMET GULEN, PARALLEL STATE AND ERDOGAN'S HIDDEN AMBITIONS

Nuruddin Al Akbar

Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

E-mail: nuruddin.alakbar@gmail.com

Diterima: 11-12-2016

Direvisi: 31-10-2017

Disetujui: 29-11-2017

ABSTRACT

This study seeks to undertake critical reading of a number of military coup d'etat attempts that took place in 2016. The failure of the military coup d'etat can be read not as a victory of democracy, but rather as the consolidation effort that is continuously formed by Erdogan's regime to increasingly exert his power in all areas of Turks life. This study rests on official discourse voiced by the Turkish government that states Gulen Hizmet movement plays an important role in the coup d'etat attempt. Unfortunately, Erdogan's regime has acknowledged Gulen steps. Then, he designed a counter-coup operation in such a way in order to, firstly, quell the coup d'etat attempts that occur thus ensuring Erdogan's regime persisted; second, make sure the coup d'etat attempt at certain level is still running so that it can be utilized for the benefit of Erdogan's regime. The research method used in this research is discourse analysis with analytical framework based on Rossa and Nugroho Notosusanto theory about G30S event in Indonesia (which has been modified to read coup attempt in Turkey). The data sources used in this study are based entirely on secondary sources, including international and Turkish media coverage of the course of the coup. Includes various articles written by various experts / analysts about the incident.

Keywords: *Erdogan, Gulen, Paralel State, Coup d'etat, Neo Ataturk*

ABSTRAK

Studi ini berupaya melakukan pembacaan kritis upaya kudeta sejumlah kalangan militer yang berlangsung di tahun 2016. Kegagalan kudeta militer yang terjadi dapat dibaca bukan sebagai kemenangan demokrasi tetapi justru upaya kondolidasi yang terus dibangun rezim Erdogan untuk semakin mencengkramkan kuasanya di semua lini kehidupan masyarakat. Studi ini berpijak pada wacana resmi yang disuarakan oleh pemerintah Turki bahwasanya gerakan Hizmet Gulen memegang peranan penting dalam upaya kudeta. Akan tetapi rezim Erdogan telah membaca langkah Gulen dan merancang operasi kontra kudeta sedemikian rupa untuk: *pertama*, menumpas upaya kudeta yang terjadi sehingga memastikan rezim Erdogan tetap bertahan; *Kedua*, memastikan upaya kudeta dalam level tertentu tetap berjalan sehingga dapat dimanfaatkan sedemikian rupa bagi kepentingan rezim erdogan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana dengan kerangka analisis yang didasarkan pada teori Rossa dan Nugroho Notosusanto mengenai peristiwa G30S di Indonesia (yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk membaca upaya kudeta di Turki). Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini sepenuhnya mendasarkan pada sumber sekunder, baik pemberitaan media internasional dan Turki sendiri mengenai jalannya kudeta tersebut, ditunjang dengan berbagai artikel yang ditulis oleh berbagai analis mengenai kejadian tersebut.

Kata Kunci: *Erdogan, Gulen, Paralel State, Kudeta, Neo Ataturk*

PENDAHULUAN

15 Juli 2016 menjadi saksi lahirnya sebuah pergolakan politik yang mengejutkan di negara Turki. Sebuah upaya kudeta militer kembali terjadi guna menumbangkan rezim Erdogan yang tengah memegang tampuk kekuasaan. Kudeta 15 Juli tersebut mengejutkan banyak pihak karena menghasilkan pemenang baru. Bukan lagi militer –yang selalu menang dalam kudeta di masa lampau- melainkan rezim Erdogan. Bagaimana bisa rezim Erdogan membalikkan keadaan dan justru mempecundangi militer yang berusaha mengkudetanya?

Jika merujuk pada sejumlah dokumen resmi yang dikeluarkan rezim pasca gagalnya kudeta, (Jakarta, 2016, CoupFacts, FETO's Coup Attempt in Turkey A Timeline), maka dapat diambil beberapa intisari penting, diantaranya: (1) Kudeta direncanakan oleh sekelompok/ fraksi dalam militer Turki. (2) Keberadaan oknum/fraksi di tubuh militer yang melancarkan kudeta tidak dapat dilepaskan dari eksistensi *parallel state* (Applebay, *Dueling Narratives: The Gulenist of The Hizmet Movement*, 2015) di dalam tubuh negara Turki.. (3) Otak dari *parallel state* ini ialah Fetullah Gulen. Tokoh agamawan kharismatik yang kini tinggal di AS pasca perseteruannya dengan rezim Erdogan. (4) Kudeta berhasil digagalkan karena kuasa rakyat heroik, kesatuan sikap partai politik –termasuk oposisi-, dan kesetiaan aparat keamanan—termasuk institusi militer—pada pemerintahan Erdogan.

Tentu saja narasi yang disusun rezim menyisakan kecurigaan tersendiri, sejauh mana keakuratannya merekonstruksi realitas. Namun sebagaimana yang disinyalir oleh Lois Fishman (2016) bahwasanya narasi rezim ini sulit untuk tertandingi. Mengingat secara *de facto* media di Turki sudah berada pada kekuasaan rezim (Force, *Diminishing Press Freedom In Turkey*, 2014). Impliksinya, suara lain yang mungkin berguna sebagai pembanding dari narasi resmi rezim sulit untuk muncul di permukaan (Economist, 2016). Sehingga bagi Fishman apa yang terjadi pra, saat, dan paska kudeta cenderung tidak jelas (Louis F, 2016). Dengan kata lain ada “mendung besar” yang menutupi realitas kudeta di negara Turki.

Studi ini merupakan ikhtiar untuk menyibak “mendung besar” yang menutupi realitas kudeta di Turki. Dimana studi ini berkeyakinan bahwasanya kudeta yang terjadi memang dirancang untuk gagal. Studi ini berkeyakinan memang pasukan di tubuh militer yang melakukan aksi merupakan anggota Hizmet. Gulen sendiri minimalnya mengetahui dan mendukung aksi anggota Hizmet tersebut. Namun dengan kecerdikan Erdogan kudeta mampu ditanggung sedemikian rupa sehingga terbentuklah kudeta gagal, yang dapat dipakai sebagai dalih Erdogan untuk semakin memperkokoh kedudukannya di bumi Turki.

KERANGKA BERPIKIR MEMAHAMI KUDETA TURKI

Sebagaimana misi studi ini yang berupaya merekonstruksi apa yang terjadi di Turki pada 15 Juli 2016. Di mana studi ini berkeyakinan jaringan Gulen bertanggung jawab dalam kudeta gagal tersebut. Hanya saja studi ini berkeyakinan Erdogan memainkan peranan penting merekayasa kudeta yang dilakukan musuhnya tersebut sehingga hasil yang diperoleh justru menjadi sumber kekuatan baru bagi Erdogan dalam menjalankan ambisi politiknya ke depan. Pertanyaan penting yang harus dijawab ialah bagaimana menteorisasikan kudeta yang ditanggung tersebut? Jawaban ini justru muncul dari pembacaan terhadap fenomena kontroversial yang terjadi di Indonesia dan masih menyisakan misteri hingga hari ini, yakni peristiwa 30 September 1965 atau yang sering dinamakan gerakan 30 September (G30S).

Sebelum menerangkan mengenai komparasi 30 September dan kudeta Turki ada baiknya mengklarifikasi satu hal penting: komparasi yang dilakukan terkait dengan rekonstruksi kudeta tidak mesti menyaratkan keserupaan dalam segala hal. Sebagaimana –nanti akan dibahas lebih detail- akademisi John Rossa melihat adanya kemiripan 30 September dengan peristiwa pembakaran Reichstag (Reichstag fire).

Kemiripan di sini dalam konteks peristiwa pembakaran atau G30S akan dijadikan dalih satu kelompok untuk menguatkan kedudukannya di

sebuah negara dan menyingkirkan lawannya yang dianggap bertanggung jawab. Rossa paham bahwa ada beda antara G30S dengan pembakaran Reichstag, di mana tidak ada jejak yang meyakinkan keterlibatan terstruktur pihak komunis dalam pembakaran Reichstag.

Berbeda dengan G30S di mana PKI yang memang memiliki keterlibatan secara struktural dalam derajat tertentu. Begitu pula dengan kasus G30S dan kudeta Turki, tidak menyaratkan adanya keserupaan dalam semua hal. Misal mengenai kondisi pra dan pascakudeta, di mana kondisi ekonomi Indonesia terbilang krisis sedangkan Turki tidak. Ataupun fase pascakudeta di mana di Indonesia terjadi pembantaian massal tetapi di Turki tidak ada informasi mendetail mengenai hal tersebut, hanya penangkapan massal.

Mengenai perbedaan kondisi tersebut penulis akui memang ada, tapi bukannya tanpa kesamaan mendasar. Seperti, kondisi prakudeta juga genting, namun bukan dalam aspek ekonomi namun dalam survivalitas. Siapa mendahului siapa. Sebagaimana di Indonesia kesehatan Soekarno yang tidak menentu membuat pihak PKI ataupun angkatan Darat “berebut waktu” dan strategi untuk memastikan dirinya yang mampu memegang kuasa pasca Bung Karno tidak bisa memimpin Indonesia (Tempo, 2015). Begitu pula dengan Turki, otomatis dengan kekuasaan militer yang melemah dan munculnya sikap keras Erdogan kepada Gulenis hanya ada pilihan “siapa cepat dia dapat”. Dalam hal ini kudeta menjadi opsi paling “nekat”¹ namun juga rasional yang bisa ditempuh Gulenis². Begitu pula keadaan

¹ Kenekatan juga diambil PKI dengan memilih Kudeta. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kondisi tidak terduga –Soekarno sakit- membuat PKI merasa khawatir dan memilih opsi melaksanakan G30S untuk memastikan Angkatan Darat anti PKI tumbang. Nuansa nekat ini diakui oleh Hamim –salah satu anggota biro khusus PKI- yang menceritakan bahwa rencana G30S tidak matang karena persiapannya yang cukup pendek. Misal massa PKI belum siap berperang. Tetapi menurut Hamim, pimpinan Biro khusus saat itu –Syam- menyatakan tidak perlu menunggu rakyat siap, cukup menggunakan unsur militer saja (Tempo, Syam Lelaki dengan Lima Alias, 2010)

² Kudeta menjadi rasional karena secara formal kelompok Gulen tidak memiliki kekuasaan apa-apa karena kendali AKP di bawah kendali penuh Erdogan. Bahkan mengandalkan Idris Bal dengan partai barunya juga tidak memiliki daya tawar apa-apa. Karena dinyatakan oleh Idris bal sendiri yang akhirnya keluar dari partainya dimana ia merasa ada tekanan kuat pada partai

pascakudeta, ada kesamaan antara Turki dan Indonesia dalam hal pembersihan massal oposisi. Hanya saja kondisi Turki kontemporer sangat sulit menerapkan “brutalitas” dalam skala yang ekstrem seperti pembantaian massal. Di Indonesia sekalipun banyak kalangan oposisi yang tidak dibantai tetapi dipenjarakan –misal di pulau Buru atau kamp plantungan- hingga akhirnya menikmati kebebasan pascajatuhnya Soeharto.

Mengenai peristiwa 30 September di Indonesia, sampai saat ini bermunculan berbagai analisis yang mencoba menguak apa yang sebenarnya terjadi dan siapa dalang di balik peristiwa tragis tersebut. Jika merujuk pada narasi yang diwacanakan negara dengan akademisi terkemukanya Nugroho Notosusanto, ditemukan penjelasan bahwasanya apa yang terjadi sejatinya adalah upaya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Rencananya melalui Gerakan 30 September, mereka membunuh para petinggi angkatan Darat yang dipercaya menghalangi ambisi mereka untuk menguasai Indonesia dan merubahnya menjadi negara komunis. Setelah kesuksesan menangkap dan membunuh para jenderal Angkatan Darat tersebut, PKI mengumumkan kekuasaan mereka atas negara dengan mendemisionerkan kabinet Dwikora yang saat itu resmi memerintah. Sebagai gantinya mereka menyusun format pemerintahan baru di bawah kendali mereka yang dinamai dewan revolusi (Poesponegoro, 2008). Unikny bahkan nama Soekarno, yang saat itu menjabat sebagai presiden juga termasuk yang tersingkir, karena tidak masuk dalam daftar susunan anggota pemerintahan baru pasca demisionernya kabinet dwikora (Djamaluddin, Jenderal TNI Anumerta Basoeki Rachmat Dan Supersemar, 1998). Namun singkat cerita upaya tersebut berhasil digagalkan oleh “kesigapan” militer kontra kudeta di bawah pimpinan Soeharto hingga berujung pada akhir petualangan para pelaku kudeta dan hancurnya PKI secara institusional dari bumi Indonesia (Herlambang, 2013).

tersebut sehingga partai eksis hanya tinggal nama saja tanpa fungsi partai yang sebenarnya (Sabah, Gülenist MP İdris Bal Resigns From The Party He Established, 2015)

Poin menarik yang menghubungkan kudeta PKI dan kasus Turki jika merujuk pada narasi yang disusun Notosusanto dan disetujui negara Orde Baru ialah konsepsi mengenai Biro khusus. Mengapa muncul konsep ini? Jawabannya ialah narasi yang disusun oleh Notosusanto berupaya melakukan *counter* terhadap analisis peristiwa 30 September yang dilakukan peneliti asing, yang dikemudian hari lebih dikenal sebagai *Cornell paper*. Menurut analisis Cornell Paper yang disusun oleh Ruth Mc Vey dan Benedict Anderson, peristiwa 30 September merupakan masalah internal angkatan darat. Dimana fraksi muda di bawah komando Untung geram dengan perilaku elit militer di Jakarta yang dianggap “borjuis” sehingga fraksi muda tersebut bertekad untuk “meluruskannya”, untuk mengembalikan marwah Angkatan Darat (Kasdi, 2012).

Analisis Cornell Paper tersebut sangat menarik karena secara realitas yang melakukan penculikan jenderal dan petinggi angkatan darat dalam gerakan 30 September dilakukan oleh militer. Termasuk penguasaan para Radio Republik Indonesia (RRI) juga dilakukan oleh militer. Jejak PKI seakan tidak nampak pada peristiwa tersebut. Tentu saja hal ini menegaskan wacana yang terbentuk secara luas pada masyarakat Indonesia bahwa PKI dalang dibalik peristiwa 30 September.

Sebagai *counter* dari *Cornell paper* itulah Notosusanto memasukkan konsep Biro Khusus untuk menunjukkan bahwa meskipun militer yang nampak di permukaan dalam upaya kudeta, namun hakikatnya mereka hanyalah pion catur yang dikendalikan oleh PKI di bawah komando Syam Kamaruzaman sebagai ketua biro khusus PKI (Notosusanto, 2008). Militer dapat dikendalikan sedemikian rupa karena hakikatnya PKI telah membentuk biro khusus yang misi besarnya menyusup ke dalam tubuh “musuh” yakni angkatan darat (Notosusanto, 2008). Biro khusus ini diharapkan makin memperkuat kedudukan PKI dalam perpolitikan Indonesia, tanpa harus menggunakan atribut PKI secara kasat mata.

Analisis Notosusanto yang menjadi narasi resmi negara terkait eksistensi biro khusus tersebut memberikan pencerahan untuk memahami kondisi yang terjadi di Turki. Dalam

kasus kudeta 15 Juli 2016 biro khusus di sana ialah *parallel state* yang dibentuk oleh jaringan Gulen sejak lama untuk menginfiltrasi “musuh”. Dalam kasus *parallel state*, jaringan Gulen tidak hanya menyasar militer saja tetapi berbagai lini pemerintahan yang lain seperti kepolisian dan kehakiman.

Konsep Biro khusus dalam narasi Notosusanto juga membantu dalam memahami “paradoks” kelompok Gulen di Turki. Perlu dipahami bahwa di permukaan, kelompok Gulen tercitrakan sebagai gerakan yang apolitis, hanya bergerak dalam bidang sosial serta spiritual (Çelik, 2010, Ziyanak, 2015).

Apolitis di sini bukan berarti menghindari ranah politik sama sekali, karena secara terbuka kelompok Gulenis menyatakan relasinya dengan berbagai politisi dari partai yang berbeda (Site, 2013). Tetapi apolitis dalam artian Gulenis mencitrakan kelompoknya tidak tertarik untuk “mewarnai” ranah politik praktis di Turki agar sesuai dengan ideologi Islam ataupun bermaksud menyerang asas-asas sekularisme Turki.

Dengan menunjukkan jalinan relasi dengan berbagai politisi dari latar belakang yang berbeda Gulenis justru semakin ingin menunjukkan citra apolitisnya, di mana dengan citra pihaknya bersahabat dengan semua kalangan politisi –termasuk dari partai sekuler- membuktikan bahwa Gulenis berposisi netral³. Jikalau disebut berpolitik, justru kalangan Gulenis seakan mencitrakan dirinya sebagai sekutu dari prinsip demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia, dengan menyatakan bahwa kelompok Gulen akan berdiri kokoh di belakang partai politik yang memperjuangkan prinsip tersebut (*Publications*, 2015).

Perlu juga ditegaskan dalam kesempatan ini mengenai keterlibatan sejumlah kalangan Gulenis yang bergabung dalam salah satu partai politik yang ada di Turki, semisal Hakan Sukur yang bergaung dengan AKP ataupun Idris Bal

³ Dalam bahasa Gulen “*We are in equal proximity to all parties. I am not saying equal distance, we are in equal proximity. Because all the followers and sympathizers of every party are our people. People’s parties and people’s political ideas are not barriers to our being friends with them*” (Çelik, The Gülen Movement: Building Social Cohesion Through Dialogue and Education, 2010).

yang mendirikan *Demokratik Gelişim Partisi*/ Democratic Progress Party (DGP). *Pertama*; secara citra dapat dikatakan bahwa masuknya mereka ke aranan politik atas inisiatif pribadi, bukan instruksi resmi dari struktur gerakan Gulen yang “apolitis”⁴. *Kedua*, secara terselubung –di balik citra- ini adalah upaya berpolitik praktis pihak Gulen untuk menguasai negara. Penulis tentu sepakat dengan kesimpulan tersebut dalam sisi ini. Dapat dikatakan ini adalah bagian dari strategi besar Gulen untuk memperkuat *paralel state* yang juga didirikan oleh Gulenis.

Tampilan apolitis Gulenis tersebut tidaklah salah dan bukan berarti hanyalah kedok semata. Konsep Biro khusus secara tegas menarik garis antara apa jalur terselubung Gulen dan jalur resmi Gulen. Jalur terselubung ialah *paralel state* yang tujuannya sangat politis, sedangkan jalur resmi sangat potensial memang apolitis dalam derajat tertentu.

Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat dengan ketidakjelasan pembedaan ini semua pihak yang mungkin mengikuti gerakan Gulen yang nampak di permukaan, potensial dituduh terlibat kudeta atau tahu soal kudeta tersebut. Padahal belum tentu semua pihak yang terlibat tahu menahu soal *paralel state* tersebut⁵.

Celaknya ketika mereka yang tidak tahu menahu soal *paralel state* tersebut ikut menjadi korban. Padahal alasan mereka bergabung dengan gerakan Gulen misalnya karena tertarik berkiprah dalam bidang sosial atau mungkin seorang yang haus akan spiritualitas dan mendapati gerakan Gulen menyediakan spiritualitas tersebut. Atau pun

⁴ Idris Bal misalnya menyatakan dirinya tidak pernah “minta restu” pada Gulen saat membentuk partainya. Sebaliknya ia menyatakan bahwa ia justru berkonsultasi pada tokoh-tokoh sipil lainnya sebelum mantap mendirikan partainya. Sebuah sikap yang nampak sekali mencitrakan tidak ada koneksi apapun secara struktural antara partainya dengan Gulen (*News*, 2014, Huriyyet, 2014).

⁵ Dalam kasus biro khusus PKI sendiri menurut telaah Djahhari, anggota PKI legal saja banyak yang tidak tahu eksistensi Biro khusus ini. Menurut Djahhari orang yang tergabung dalam biro khusus memang sengaja “dipisahkan” sedemikian rupa dengan struktur PKI. Semisal ada langganan anggota biro khusus datang ke kantor PKI untuk meminta dana dan fasilitas. Anggaran mereka sudah disediakan terpisah. Analisis Djahhari sangat beralasan jika ditinjau dari sisi intelejen. Tentunya jika komunikasi antara biro khusus dan anggota Pki begitu terbuka infiltrasi itu dapat terbongkar dengan cepat (Djahhari, *Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, 2012)

alasan lain yang sangat banyak dan tidak dapat digeneralisir.

Pertanyaan yang kemudian muncul jika menggunakan kerangka analisis yang dibangun oleh Notosusanto dalam memahami kudeta Turki 2016 tentu menyisakan pertanyaan besar. Sebab eksistensi biro khusus justru membuktikan jaringan Gulen sebagai aktor utama. Lalu bagaimana menyatakan Erdogan bisa terlibat berdasarkan skema Notosusanto tersebut? Jawaban terhadap masalah ini diberikan oleh analisis gerakan 30 September yang diberikan oleh seorang akademisi bernama John Rossa.

Analisis Rossa sendiri muncul ditengah serangan hebat kepada narasi yang disusun oleh Notosusanto dan diterima sebagai narasi resmi negara selama Orde Baru. Runtuhnya Orde baru ditambah dengan dibebaskannya tahanan politik yang diduga terlibat peristiwa gerakan 30 September membuat narasi baru bermunculan.

Jika dahulu rezim dihadapkan pada *Cornel paper*; namun sekarang dihadapkan pada variasi narasi yang berbeda dalam merekonstruksi peristiwa 30 September. Namun patut untuk ditegaskan salah satu narasi yang cukup kuat muncul pascareformasi adalah ide bahwa penguasa Orde Baru Soeharto yang dahulu dielu-elukan dalam narasi resmi negara karena mampu menghalau gerakan 30 September beserta “tuannya” yakni PKI ternyata juga “berlumuran darah”. Dalam sejumlah narasi yang ditopang kesaksian tapol (tahanan politik) 65 menguatkan narasi bahwa Soeharto bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa 30 September (Adam, 2009).

Jika ditelusuri secara seksama Rossa menyusun sebuah rekonstruksi sejarah yang cukup unik. Dia berupaya merangkai narasi telah ada selama ini, termasuk narasi rezim untuk membuat sebuah kesimpulan khas Rossa sendiri. Kata kunci untuk memahami rekonstruksi sejarah ala Rossa sebenarnya terletak pada gagasannya tentang kemiripan gerakan 30 September dengan apa yang disebut pembakaran Reichstag (*Reichstag fire*).

Dalam kasus Reichstag yang terjadi pada 27 Februari 1933 menjadi salah satu tonggak penting yang memicu konsolidasi rezim NAZI di Jerman hingga mendapatkan kekuasaan

mutlak untuk memerintah Jerman. Pembakaran Reichstag sendiri diduga dilakukan oleh seorang bernama Marinus van der Lubbe yang merupakan anggota partai komunis Jerman (Susan, 2015).

Pembakaran yang dilakukan Lubbe ini dengan segera menjadi dalih bagi partai NAZI di bawah Adolf Hitler untuk memaksa presiden Hindenberg untuk mensahkan undang-undang darurat sebagai upaya menghadapi ancaman Merah di Jerman (Kerr, Germany, 1919, 39, 2003). Segera saja undang-undang tersebut digunakan NAZI untuk menghabisi kaum komunis Jerman. Dengan sirnanya kaum komunis pascapembersihan oleh NAZI, secara otomatis memperkuat kedudukan sang kanselir NAZI, Adolf Hitler (Frank, 2008).

Perlu ditambahkan hingga kini fakta mengenai pembakaran Reichstag masih misterius, dan memicu perdebatan di kalangan sejarawan. Misal menurut seorang sejarawan Tobias yang menyatakan bahwa Lubbe merupakan pelaku tunggal, sebuah analisis yang tentunya berkontradiksi dengan propaganda NAZI tentang ancaman komunis (Beck, *The Fateful Alliance: German Conservatives and Nazis in 1933*, 2010). Namun apa yang sebenarnya terjadi tidaklah penting. Bagi NAZI tertangkapnya Lubbe merupakan hal terpenting sehingga bisa menjadi bahan propaganda rezim untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan menghabisi oposisi. Di mana dalam kasus Jerman ialah komunis.

Menurut Rossa apa yang terjadi dalam kasus pembakaran Reichstag dapat dianalogikan untuk membaca peristiwa 30 September. Rossa sendiri memaparkan beberapa ciri khas pembakaran Reichstag yang dapat digunakan sebagai bekal memahami gerakan 30 September, yakni: (1). Sudah ada keputusan untuk menyerang partai komunis sebagai oposisi NAZI. 2.) propaganda besar NAZI pascaterjadinya pembakaran. (3). Keluarnya undang-undang darurat yang membuka jalan untuk mengeliminir musuh/lawan politik NAZI. 4.) Penangkapan besar-besaran oposisi NAZI dari kalangan komunis oleh rezim. Ciri khas tersebut menurut Rossa juga terdapat dalam kasus 30 September, yakni: (1). Sudah ada keinginan menghabisi komunis sebagai

lawan angkatan Darat yang anti Komunis. (2). propaganda besar tentang gerakan 30 September oleh pihak angkatan Darat (3). Keluarnya restu Sukarno kepada Suharto untuk menindak gerakan 30 September (4). Penangkapan besar-besaran anggota PKI oleh Soeharto (Rossa, 2008).

Ciri khas pembakaran Reichstag yang dinyatakan Rossa di atas jika ditarik secara generik untuk membaca Turki, akan melahirkan beberapa poin yakni: (1). Sudah ada perencanaan untuk menghabisi lawan politik sebelum terjadinya kudeta. (2). propaganda besar rezim pascaterjadinya kudeta dengan menuduh lawan politik sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. (3). Keluarnya undang-undang darurat yang membuka jalan mengeliminir musuh/lawan politik rezim. (4). Pembersihan masal “virus” yang merajalela di berbagai institusi.

Jika merujuk pada analisis Rossa terkait gerakan 30 September, sebenarnya ia berupaya mengembangkan wacana tandingan untuk “membersihkan” atau setidaknya “meminimalisir” dosa PKI. Hal ini nampak dari analisisnya bahwa memang peristiwa 30 September dirancang oleh PKI, dalam artian sejumlah kecil petinginya. Namun yang terjadi saat itu bukan sebagaimana dibayangkan sebagian orang bahwasanya petinggi TNI AD memang diculik namun tidak ada rencana dibunuh. Apalagi disiksa terlebih dahulu. Kesalahan terjadi dalam proses eksekusi kebijakan di mana militer yang bertugas di lapangan malah membunuh Jendral dan petinggi TNI AD yang diincar. Karena sitasi diluar dugaan maka petinggi TNI AD yang tersisa diperintahkan untuk dibunuh pula karena tidak mungkin menghadapkannya pada presiden Soekarno untuk kemudian dicopot dari jabatannya (Rossa, 2008).

Narasi yang menurut Rossa valid ini kemudian dicampuraduk dengan imajinasi ala TNIAD yang akhirnya melahirkan narasi rezim, dimana PKI memang berencana membunuh dan menyiksa jendral, dan kemudian mengambilalih kekuasaan (Rossa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, 2008). Dengan kata lain aspek kedua yakni “propaganda besar tentang gerakan 30 September

oleh pihak angkatan Darat” adalah propaganda campuran berdasarkan realitas dan imajinasi yang direkasaya untuk kepentingan politis sang pembuat propaganda, dalam hal ini Soeharto. Kesimpulannya peristiwa 30 September berhasil ditunggangi sedemikian rupa oleh TNI AD di bawah komando Soeharto sehingga memungkinkan memuluskan ambisinya untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan “secara merangkak” dalam skema konstitusional.

Pembacaan ala Rossa tersebut menjadi penting untuk menerapkannya dalam merekonstruksi aksi kudeta. Di mana memang benar Gulen merencanakan kudeta namun rencana tersebut telah ditunggangi sedemikian rupa sehingga bukannya menghabisi rezim Erdogan, namun justru menggulung Gulen berserta paralel *statenya*. Namun tentunya jika dalam narasi Rossa Soeharto hanya menunggangi dalam hal wacana, tanpa mencampuri jalannya aksi 30 September hal yang berbeda terjadi di Turki.

Upaya kudeta itu sendiri yang ditunggangi sehingga posisinya bagaikan virus yang telah dilemahkan sebagaimana dipergunakan untuk imunisasi. “Virus” Gulenis yang telah “dilemahkan sedemikian rupa” diberi ruang untuk disuntukkan dalam “tubuh” negara Turki. Hasilnya tentu saja bukan “tubuh” negara Turki –di bawah kendali rezim Erdogan- yang terserang penyakit mematikan, tetapi “virus” yang “lemah” tersebut yang justru dipecundangi “antibodi” tubuh. Hasilnya “virus” tersebut lenyap dan “tubuh” negara Turki –di bawah kendali Erdogan- tetap sehat bahkan semakin kuat.

KUDETA (YANG DIRANCANG) GAGAL

Kudeta gagal 2016 tidaklah dapat dilepaskan dari pembacaan relasi masa lalu yang dijalin oleh dua tokoh besar yang saling beroposisi dalam kudeta yakni Erdogan dan Gulen. Jika merujuk pada sejarah Turki akan ditemukan sebuah masa “romantis” di antara kedua tokoh tersebut, namun akhirnya masa “romantis” itu berkahir dan digantikan masa “permusuhan”. Tentu saja puncak dari masa

“permusuhan” itu terjadi pada kudeta Turki, di mana Erdogan dengan keras mengecam Gulen sebagai aktor di balik kudeta berikut jaringan *paralel state nya*, sebaliknya Gulen mengecam balik Erdogan sebagai sandiwara Erdogan untuk menjadikan Turki di bawah kontrol total dirinya.

Perjumpaan Gulen dan Erdogan sebenarnya didasari oleh adanya musuh bersama, yakni negara sekuler warisan Ataturk. Kedua tokoh tersebut memiliki prinsip yang sama yakni tidak senang dengan wajah Turki yang sekuler. Alasannya sangat rasional, jika ditilik dari latar belakang kedua tokoh tersebut sama-sama bermuara pada identitas islam yang kuat. Erdogan diasosiasikan dengan kelompok Milli Gorus sedangkan Gulen dengan kelompok Nurcu (Gunter, 2003).

Sebagaimana ditegaskan sebelumnya, Erdogan diasosiasikan berafiliasi ke kelompok *Milli gorus*. Membicarakan *Milli Gorus* sendiri tidak dapat dipisahkan dari tokoh penting bernama Erbakan. *Milli Gorus* sendiri berakar kuat dari tradisi tariqah sufi Nanqsabandi aliran Khalidi. Tradisi Naqsabandi-Khalidi ini dalam sejarah Turki memiliki sentimen kuat pada politik dan syariah (Center, 2015).

Tentu saja tradisi kuat Naqsabandi-Khalidi ini tercermin dari sejarah kelompok Milli Gorus sendiri sejak dicanangkan secara terbuka oleh Erbakan selalu berupaya berkiprah dalam dunia politik. Tercatat gerakan Milli Gorus terus berupaya menghadirkan partai Islam bahkan sejak tahun 1969 sebagai kendaraannya untuk mentransformasikan Turki sesuai visi Islam ala Milli Gorus.

Partai pertama yang didirikan bernama *Milli Nizam Partisi (National Order Party)*. Namun partai ini harus gulung tikar setelah di tahun 1971 dilarang oleh mahkamah konstitusi Turki (Friedrichs, 2012). Ditutupnya *Milli Nizam Partisi* tidak membuat kelompok Milli Gorus menyerah. Tercatat tahun 1972 didirikan kembali partai Islam bernama *Milli Selamet partisi (National Order Party)* yang bertahan sampai tahun 1980 karena ditutup paska oleh rezim militer (Friedrichs, 2012). Kembali Milli Gorus menampakkan militansinya di tahun 1983 mendirikan *Refah partisi (welfare Party)*

(Friedrichs, 2012). Di masa partai Refah inilah karir politik Erdogan dimulai.

Sebagaimana strategi politik ala Atatürk yang berusaha menjadikan dirinya *Hero* di mata masyarakat untuk memperkuat kedudukan politiknya, saat karir politik Erdogan dimulai ia juga berupaya menjadi “hero” di kalangan masyarakat. Cita-cita untuk membangun citra tersebut mendapatkan jalan ketika ia terpilih menjadi walikota Istanbul. Saat menjabat Erdogan menggunakan prinsip “pro wong cilik”, yang dilakukannya seperti turun langsung membersihkan jalan dengan baru pekerja sama seperti rakyat Istanbul pada umumnya (Basyar H. M., 2015). Erdogan juga membuta berbagai kebijakan “pro wong cilik” selama ia menjabat sebagai walikota (Basyar H. M., 2015). Strategi politik Erdogan tersebut terbilang berhasil, dimana warga seringkali menyatakan “*he’s just like us*” (Basyar H.M, 2002). Sebuah pernyataan yang sangat penting dari sisi politik karena warga menanggapi Erdogan adalah bagian dari dirinya.

Perubahan Politik terjadi ketika partai Rafah yang menaungi karis politiknya kembali menjadi target rezim sekular. Alasannya refah yang muncul sebagai kekuatan besar politik rentan “menyalahgunakan kekuasaan” untuk “membunuh demokrasi” (Wetlesen, 2010). Erdogan sendiri termasuk anggota partai yang ditangkap oleh rezim (Bayat, 2013). Ia ditangkap karena tuduhan menyulut kebencian religius karena membacakan puisi dari Zia Gokkap (Powell, 2016).

Satu pelajaran penting dari penangkapan ini ialah citra sebagai *hero* di mata rakyat saja tidak cukup. Buktinya diri Erdogan dan partainya tetap dapat dilumpuhkan rezim sedemikian rupa. Inilah titik balik Erdogan menyusun strategi politik baru yang menggabungkan antara penciptaan citra positif baik pada rakyat dan rezim sembari menjalin aliansi dengan pihak yang dirasa bisa menjadi kawan seperjuangan dalam memuluskan ambisi Erdogan untuk menguasai Turki dan membentuk sesuai visinya. Disinilah jalinan “harmonis” dengan Gulen dimulai dengan satu tujuan melemahkan rezim sekuler Turki.

Sebagaimana Erdogan, Gulen juga punya sejarah tidak mengenakkan berurusan dengan rezim sekuler Turki. Sejarah pahit Gulensejatinya ini dapat dilacak dari sejarah panjang eksistensi kelompok Nurcu di Turki. Kelompok Nurcu sendiri dinisbatkan kepada tokoh Sufi kenamaan Turki Said Nursi. Said Nursi sendiri memiliki jejak perseteruan panjang dengan rezim sekuler Turki. Sejak pendirian negara modern oleh Atatürk, Nursi telah dipenjarakan dengan tuduhan ikut sera dalam pemberontakan kaum Kurdi. Setelah dibebaskan ia kembali merasakan jeruji besi ketika menentang kebijakan sekularisasi Atatürk (Basyar M. H., 2015).

Semangat anti sekularisme yang menjadi ruh perjuangan Nursi inilah yang juga merasuk ke dalam diri Gulen, sebagai salah satu fraksi yang berkembang dalam gerakan Nurcu⁶. Sebagai salah satu fraksi Nurcu dengan gerakan Hizmetnya yang diinisasi pada tahun 70an, Gulen juga mengalami masa-masa pahit menghindari sensor dari rezim yang berkuasa. Sehingga Gulen memilih tiarap hingga masa keterbukaan di tahun 1983 (Djavadi, *The Gulen Movement’s Collision Course With The Turkish State*, 2016). Masa keterbukaan seakan menjadi musim semi bagi gerakan Hizmet, dimana gerakan tersebut berhasil menarik banyak pengikut, termasuk dari kalangan pebisnis. Masuknya kalangan pebisnis ke jaringan Hizmet memungkinkan gerakan tersebut semakin membesar sedemikian rupa (Djavadi, 2016).

Pengalaman buruk di bawah rezim yang memaksa gerakan Gulen harus tiarap tentu membuat Gulen merancang strategi sedemikian rupa agar di masa depan rezim tidak lagi menganggap Gulen sebagai musuh. Namun disisi lain Gulen yang tentunya mewarisi jiwa Nursi juga tidak tinggal diam untuk mengubah keadaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan –meskipun tidak dapat dipastikan- sejak tahun 1983 Gulen mulai merancang strategi *parallel state*. Hal ini dimudahkan dengan tergabungnya makin banyak

⁶ Dalam situs resmi Gulen, dinyatakan bahwa Gulen pernah menimba ilmu pada salah seorang murid Said Nursi –meskipun tidak disebutkan namanya- dan mengaku begitu terpengaruh pada pemikiran Said Nursi. Bahkan menurut situs resmi tersebut Gulen mengembangkan gerakan Hizmet dengan prinsip-prinsip Said Nursi (Yücel, 2015)

kalangan ke gerakan hizmet, termasuk dari kalangan berpunya.

Bagaimana detail strategi *paralel state* ini berhasil sedemikian rupa hingga menginfiltrasi militer dan jabatan penting negara seperti kehakiman? Setidaknya ada dua strategi besar yang telah diketahui dirancang Gulen. Rancangan besar ini kesemuanya melibatkan dunia pendidikan.

Pertama, melalui sekolah yang dimiliki oleh Gulenis. Dengan jaringan sekolahnya yang mencapai ratusan, berbagai alumnus sekolah Gulen dengan mudah memasuki berbagai lini pekerjaan, termasuk jabatan-jabatan publik termasuk instansi militer.

Melalui strategi pendidikan inilah Gulen potensial merekrut banyak kader yang loyal untuk turut bergabung dan membaktikan hidupnya dalam *paralel state* ketika telah menduduki jabatan publiknya (Amsterdam, 2016) Sebagaimana kampus atau institusi pendidikan di negeri ini yang seringkali memanfaatkan jaringan alumnusnya untuk kepentingan institusi maka langkah yang sama amat mudah untuk ditempuh Gulen dengan jaringan pendidikannya⁷.

Kedua, sebagaimana dinyatakan oleh peneliti Gulenis Ahmed Zeki Ucok (Kozok, 2016). Ucok sendiri sempat ditangkap rezim Erdogan (saat belum pecah kongsi dengan Gulen) karena hasil penelitiannya yang kontroversial membongkar salah satu rahasia besar *paralel state* Gulen, yakni strategi sistematis dalam upaya pencurian jawaban ujian negara di Turki. Turki sendiri mengenal sistem ujian negara (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi/ÖSYS) yang diperlukan sebagai prasyarat memasuki jenjang pendidikan universitas di negara tersebut.

Dengan adanya pencurian jawaban tersebut, pihak Gulen memanfaatkannya secara baik dengan memberikannya ke kader-kader/kalangan dekat Gulenis yang sedang menempuh pendidikan. Dengan cara itu kader-kader Gulenis

dengan mudah membanjiri universitas kenamaan Turki dan akademi militer dalam waktu singkat dan menyisihkan kalangan non Gulen dengan mudah.

Membanjirinya kalangan Gulen di institusi pendidikan terkemuka memudahkan mereka mendapatkan jabatan yang bergengsi pula –baik di militer atau jabatan publik lain. Menurut Ucok strategi ini sudah dimulai di tahun 80an dan diperkirakan 40.000 orang telah “diuntungkan” dengan strategi tersebut (Kozok, 2016).

Sebagai tambahan, sangat dimungkinkan kalangan yang memegang jabatan penting di militer atau institusi publik juga melakukan praktik kolusi dan nepotisme untuk menambah jumlah kader *paralel state* Gulenis di institusinya masing-masing. Termasuk pula ada kemungkinan anggota *paralel state* mempengaruhi kalangan awam non Gulenis untuk ikut bergabung dengan mereka –tentunya ketika mereka sudah dipercaya- sehingga jumlah anggota *paralel state* lebih banyak dari yang diperkirakan Ucok.

Dengan makin banyaknya pihak yang bergabung dengan Hizmet, tercatat di tahun 1990an gerakan Gulen telah berkembang sedemikian pesat dan dapat disandingkan dengan kekuatan Erbakan dengan partai refahnya. Namun berbeda dengan Refah yang terus terang dengan visi Islamnya. Gulen memilih sikap yang pro rezim sekuler di permukaan. Sikap ini menjadikannya dekat dengan politisi terkemukanya saat itu semisal tansu Ciller (Kramer, A Changing Turkey: The Challenge to Europe and the United States, 2000).

Tentu saja sikap Gulen menghadirkan kritik keras dari sebageian kalangan muslim Turki sebagai seorang pengkhianat (Kramer, A Changing Turkey: The Challenge to Europe and the United States, 2000). Namun sikap ramah tersebut mestilah dibaca sebgaisisaat seorang Gulen, karena meskipun pada satu sisi ia menampilkan sikap “ramah” terhadap rezim, namun pada sisi yang lain Gulen terus mengembangkan *paralel statenya* secara diam-diam guna menguatkan cengkramannya pada negara sekuler. Dalam konteks ini ada benarnya jika ada sebagian kalangan bahwa strategi yang

⁷ Namun perlu ditegaskan pula meskipun jaringan alumni ini potensial dimuati politik *paralel statenya* Gulen, namun tidak menegasikan adanya alumnus sekolah Gulen yang tidak terlibat jaringan *paralel state*. Tentunya hanya kader yang dipercaya saja yang akan ditugaskan dalam misi rahasia tersebut. Sehingga tetap tidak ada alasan bagi aparat untuk sewenang-wenang pada alumnus sekolah gulen secara umum.

ditempuh gulen adalah strategi *taqiyah* (Kramer,, 2000).

Meskipun berupaya menampilkan didi sebagai kelompok yang tidak membahayakan rezim namun kenyataannya ketika pemberangusan terhadap partai refah terjadi, kelompok Gulen juga terkena dampaknya. Guna menghindari kemungkinan terburuk, Gulen memilih mengungsi ke AS agar tidak terjangkau rezim. Intuisi Gulen ternyata tepat karena rezim akhirnya membongkar *paralel state* yang dibangun Gulen selama ini. Terbongkarnya jaringan rahasia Gulen bersamaan dengan diemukannya video kaset yang mengindikasikan pendirian *paralel state* oleh Gulen (Tittensor, 2014).

Meksipun rencana rahasianya terbongkar namun tidak menjadi ajal bagi *paralel state* bentukan Gulen. Hal ini dapat terjadi karena anggota *paralel state* memegang teguh taktik ala Gulen sebagaimana disebutkan dalam video kaset yang berhasil disita aparat, dimana para anggota *paralel state* dituntut harus bisa memposisikan diri sedemikian rupa “hingga waktu yang tepat” (Tittensor, 2014).

Dalam kaitannya dengan ambisi Erdogan, eksistensi *paralel state* Gulen tersebut tentunya sangat menarik dari sisi politik untuk membantu Erdogan melangkahhkan kaki menuju tampuk kekuasaan tertinggi di Turki. Pada akhirnya Erdogan mampu membujuk Gulen untuk bekerjasama dengannya dan memebentuk aliansi dua kekuatan besar guna melawan rezim sekuler Turki.

Dikarenakan keterbatasan ruang maka pembahasan mendetail mengenai dinamika koalisi Erdogan dan Gulen tidak akan dibahas. Tapi intisarinnya kedua tokoh tersebut berbagi peran masing-masing, dimana Erdogan dan AKP bermain di ranah formal-politik praktis, sementara Gulen bekerja di ranah informal dengan *paralel statenya* untuk mendukung kinerja Erdogan agar tidak kembali bernasib sama layaknya partai islam pendahulunya yang diberangus rezim.

Aliansi Erdogan-Gulen terbukti mampu melemahkan sedemikian rupa rezim sekuler di Turki. Salah satunya dengan membuka tabir dan mempercundangi organisasi rahasia *Ergenekon*

dan operasi *Sledgehammer*. Ergenekon sendiri merujuk pada gerakan bawah tanah (klandestein) yang berideologi ultra nasionalis. Pengikut gerakan ini mengaku sebagai pembela sekularisme dan kedaulatan nasional. Mereka beranggapan bahwa sebagai pembela sekularisme dan kedaulatan nasional mereka berhak meyingkirkan pemerintahan yang dianggapnya menyimpang, sekalipun pemerintahan itu dipilih secara demokratis (Koc, 2012).

Dengan keanggotan Ergenekon yang juga berasal dari kalangan militer dan aparat keamanan tentunya semakin menambah kekuatan dari organisasi tersebut (Elver, 2012). Ergenekon sendiri mempunyai misi menyulut berbagai aksi kekerasan di Turki, seperti pembunuhan dan serangan terhadap institusi publik. Tujuannya agar menjadikan situasi *chaos*. Tentunya dengan kondisi semacam ini menurut bayangan Ergenekon akan membuka jalan militer untuk mengambil alih pemerintahan (Elver, 2012).

Senada dengan Ergenekon, Sledgehammer juga terkait dengan kaum sekuler. Bedanya Sledgehammer adalah nama bagi operasi kudeta yang sekiranya akan dilancarkan oleh fraksi militer Turki yang setia pada prinsip sekularisme untuk menggulingkan rezim AKP. Terungkapnya operasi Sledgehammer sendiri ketika dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah komputer milik salah satu kolonel Turki. Tentu saja kolonel tersebut merupakan jaringan Sledgehammer. Dari komputer tersebut didapatkan berbagai nama tokoh militer top, politisi, hingga insan media (Howard, 2016).

Arti penting pengungkapan kedua kasus diatas merupakan kemenangan besar bagi aliansi Gulen-Erdogan. Mereka berhasil membalikkan keadaan dimana sebelumnya kalangan Islam yang dihabisi, namun dengan persekutuan mereka jaringan sekuler berhasil dinetralisir sebelum menjalankan aksinya. Arti penting lain dari kasus tersebut termanifestasi dalam dua hal: (1). menjadi dalih untuk menyingkirkan oposisi pemerintahan Erdogan, khususnya di kalangan kaum sekular dan memperkuat cengkraman rezim Erdogan. Manuver ini nampak jelas ketika skandal Sledgehammer terbongkar, Pemerintah Erdogan segera mengintervensi internal militer

turki, semisal dalam hal transfer dan promosi anggota militer (paker, 2013). (2). Menciptakan citra positif bagi rezim Erdogan dimana mereka adalah korban dari permufakatan jahat sekuler yang “antidemokrasi”.

Sukses melemahkan rezim sekuler sebenarnya merupakan pertanda alamiah bahwa jalinan aliansi Erdogan-Gulen diujung tanduk. Sebab sebagaimana kasus Ataturk, adanya tokoh yang sama-sama kuat berpotensi menciptakan pemerintahan dualistis. Hal ini tentunya bertentangan dengan ide Ataturk tentang kuasa penuh di tangan seorang kuat yang dengannya ia dapat menginjeksikan visi besarnya ke dalam masyarakat Turki. Erdogan yang notabene merupakan Ataturk kedua tentunya menyadari hal ini, dan menganggap Gulen sebagai ancaman berikutnya yang harus diseingkirkan pasca melemahnya kaum sekuler. Disinilah kudeta (yang dirancang) gagal menjadi panggung utama untuk menghabisi Gulen dan sekutunya yang merupakan kawan lamanya.

Sebelum meletusnya kudeta, pertentangan dua tokoh tersebut sudah begitu nyata dan berupaya mengeliminasi atau setidaknya melemahkan satu sama lain. Erdogan berupaya melemahkan Gulen dengan upaya menutup Dershane. Institusi tutor yang kebanyakannya di Turki adalah milik jaringan Hizmet Gulen (Balci, 2014).

Penutupan tersebut tentunya diharapkan memutus pendanaan dan sumber rekrutmen anggota yang terus mengalir ke jaringan Gulen. Gulen sendiri dengan bantuan *parallel statenya* di kehakiman dan aparat keamanan membuka skandal korupsi di tubuh AKP. Termasuk di kalangan orang dekat Erdogan seperti anak laki-laki dan ketiga menteri (Balci, 2014).

Perseteruan tersebut sangat jelas membuktikan bahwa opsi kudeta merupakan salah satu pilihan rasional yang dapat ditempuh Gulen untuk mengakhiri rezim Erdogan yang berupaya menghancurkan gerakan Hizmet dan *parallel statenya*. Opsi tersebut masuk akal, sebab sebagaimana analisis Sitaresmi Soekanto bahwa upaya *blow up* kasus korupsi di tubuh AKP sejatinya adalah bentuk upaya kudeta juga, yakni

mendorong terjadinya kudeta sipil (Soekanto S. S., 2016).

Terkait dengan upaya kudeta yang dimotori gerakan Gulen sendiri beserta bukti yang mengarah kepada tesis bahwa kudeta ditunggangi sedemikian rupa setidaknya dapat dipilah berdasarkan kronologi waktu, yakni pra kudeta, saat kudeta, dan pasca kudeta.

Fase Pertama, pra kudeta. Pada fase ini setidaknya ada 3 bukti yang mengarah kepada Gulenis sebagai otak dibalik kudeta namun disisi lain meegaskan upaya menunggangi oleh rezim:

(1). Perceraian mendadak sekitar 3000 anggota Militer turki pro gulen sebelum terjadinya kudeta. Perceraian tersebut dilakukan berdasarkan fatwa dari Gulen (Soekanto S. S., 2016). Menurut Soekanto kasus perceraian tersebut merupakan dalil tidak terbantahkan bahwa Gulen merupakan otak di balik kudeta. Para tentara pengikut Gulen tersebut diharuskan menceraikan istrinya agar jika terjadi apa-apa pada diri mereka saat menjalankan tugas maka keluarga dan aset mereka tidak terusik (Soekanto S. S., 2016).

Analisis dan bukti yang diberikan oleh Soekanto tersebut sangat menarik karena menegaskan Gulen dan kelompok *parallel statenya* di balik kudeta Turki. Namun permasalahannya muncul ketika perceraian itu sama sekali tidak terendus oleh rezim. Tentu sangat mustahil jika ada keanehan cerai masal secara tiba-tiba, terlebih di kalangan militer. Sebab perceraian secara sah semestinya membutuhkan persyaratan legal formal tertentu.

Fakta bahwa perceraian massal tersebut berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun sejatinya menyiratkan potensi besar negara –khususnya intelejen- dan institusi militer harusnya sudah mendeteksi keanehan tersebut dan melacakinya dengan seksama. Kecuali memang ketiadaan tindakan dari pemerintah merupakan hal yang disengaja, yakni untuk membuka ruang terjadinya kudeta berdarah yang meletus pada 15 Juli. Jika hal itu yang terjadi tentunya pemerintah telah memikirkan strategi khusus untuk “menyambut” aksi kudeta tersebut dengan “kado” spesial bagi para pengkudeta.

(2). Daftar nama pejabat militer yang akan disingkirkan oleh Erdogan di bulan Agustus. Zeynep Gambetti menyebutkan hal ini dalam analisisnya, dimana dengan adanya dugaan telah tersebar bocoran daftar nama pejabat militer yang akan disingkirkan tentunya memberikan rasa ketakutan tersendiri di tubuh *paralel state* Gulen dalam struktur militer. Mereka yang takut akan mendekam dipenjara akan mengambil langkah preventif untuk menyelamatkan diri (Gambetti, 2016). Hal ini tentunya merujuk pada upaya mendahului penyingkiran oleh rezim dengan kudeta pada bulan Juli.

Analisa Gambetti ini juga didukung oleh Suraj Sharma. Bahkan Sharma menukil adanya kepercayaan pada banyak pengamat, termasuk menukil Ibrahim Kiras, yang menjabat sebagai editor Koran Karar, yang merupakan sayap liberal dari AKP (Sharma, 2016). Sebagaimana kasus perceraian massal, bocornya daftar nama pejabat militer yang akan disingkirkan ini apakah murni dari intelejensi di kalangan *paralel state* gulen ataukah rezim yang sengaja membocorkannya?

Kedua kemungkinan tersebut sah, namun jika memandang bocornya daftar ini satu rangkaian dengan keanehan “pembiaran” kejadian aneh cerai massal nampak bahwa rezim sendiri yang membocorkan daftar ini lebih kuat. Tujuannya memicu kepanikan di kalangan militer Gulenis dan melancarkan kudeta. Kudeta itulah yang nantinya sudah siap diambil oleh rezim, sehingga yang terjadi sebagaimana istilah Sharma yakni *suicidal attack* (serangan bunuh diri). Pasukan gulen terbunuh akibat kepanikan mereka sendiri sehingga masuk perangkap.

(3). Bocoran Wikileaks. Menurut Andy Greenberg Wikileaks mendapatkan ribuan dokumen tentang AKP dan Erdogan sekitar seminggu sebelum kudeta (Greenberg, 2016). Bocoran dokumen itu tentunya mengundang kecurigaan tersendiri, terkait siapa pihak yang membocorkannya kepada Wikileaks.

Jika merujuk pada sejarah masa lalu dimana jaringan *paralel state* Gulen mampu mengungkap skandal korupsi Erdogan yang mem *blow up* nya ke masyarakat, sangat dimungkinkan sumber data wikileaks tersebut berasal dari sana. Namun apa fungsi data tersebut dikirimkan ke

wikileaks? Paling tidak ada dua fungsi yang dapat dipetik oleh kalangan Gulenis.

Jika kudeta berhasil maka publikasi Wikileaks akan menjadi pembenaran tersendiri bagi aksi kudeta, dimana militer pro Gulen dapat berkilah pihaknya melakukan tindakan yang tepat untuk mengkudeta rezim yang tidak bersih. Namun jika gagal, maka setidaknya data “aib” AKP dan Erdogan telah tersimpan di arsip wikileaks dan dapat dibuka sewaktu-waktu oleh wikileaks yang dikenal “garang” dengan rezim manapun sehingga setidaknya kembali mencoreng citra Erdogan dan AKP di mata rakyat.

Jika tesis ini dipakai maka semakin menguatkan tuduhan bahwa Gulenis di balik aksi kudeta Turki. Namun ada juga kemungkinan kedua, di mana pihak Erdogan sendiri yang membocorkan dokumen “aib” tersebut. Ini juga adalah tindakan “nekad” yang ditempuh kubu Erdogan. Taruhannya dengan bocoran tersebut akan semakin menguatkan tekad kubu Gulenis untuk memberontak, karena merasa ada pijakan yang dapat mereka gunakan.

Tindakan inilah yang ditunggu-tunggu pihak Erdogan untuk kemudian menghabisi mereka. Namun jika gagal, alias pemberontak tidak terpancing maka dengan mudah Erdogan akan memblokir akses pada Wikileaks sehingga sulit diakses oleh masyarakat Turki. Pilihan ini berisiko karena kalangan yang mengerti dunia komputer bisa menembus blokir rezim, tetapi perlu diingat rezim punya kuasa legal untuk menghukum pihak yang menyebarkan berita tersebut di dalam negeri. Sehingga secara hitung-hitungan politis tidak merugikan rezim Erdogan secara serius jika diambil pilihan tersebut.

Jika mencermati strategi gerak cepat rezim Erdogan menutup Wikileaks tidak lama berselang pasca kudeta terjadi, bersamaan pula dengan rilis resmi dokumen AKP dan Erdogan oleh Wikileaks (Shaheen, 2016), nampaknya hipotesis kedua –bahwa kubu Erdogan sendiri yang membocorkan- lebih kuat.

Paska mencermati fase pra kudeta -di mana hipotesis yang diangkat adalah militer dan kubu pro Erdogan sudah siap dengan aksi kudeta Gulenis- maka pembahasan dilanjutkan kepada

fase Kedua, yakni saat kudeta. Dalam kudeta satu hal yang tidak boleh luput ialah melumpuhkan elit-elit lama sehingga situasi transisi kekuasaan akan berjalan dengan lancar. Dalam hal ini tertangkap/tewasnya Erdogan dan Bilal Yildirim yang merupakan pimpinan AKP dan negara Turki merupakan kemestian jika ingin kudeta sukses. Jika “kepala” elit lama ini sirna maka dengan mudah militer Gulenis mengklaim kemenangan dalam kudeta. Ternyata tidak tanggung-tanggung pemberontak berupaya melenyapkan mereka selamanya –alias dibunuh-.

Uniknya rencana pembunuhan dua pemimpin Turki ini gagal secara mengejutkan. Erdogan berhasil lolos dari maut dengan cara tidak lazim. Hanya dalam hitungan menit hotel yang dia diami selama liburan diserang oleh pengkudeta. Erdogan sendiri dengan tegas menyatakan jika 10-15 menit saya masih di sana mungkin saya tidak akan selamat (Sales, 2016).

Hal yang sama juga terjadi pada diri perdana menteri Binali Yıldırım. Pasukan kudeta sebenarnya telah melancarkan serangan tepat pada kantornya di parlemen Turki. Akan tetapi uniknya sang perdana menteri ternyata sedang berlibur sehingga secara “ajaib” lolos dari serangan (Linning, 2016).

Lolosnya dua pimpinan penting Turki, terlebih Erdogan di saat-saat kritis ini sejatinya dapat ditafsirkan dua hal. Mereka benar-benar orang yang beruntung -meminjam istilah Erdogan “hadiah Tuhan”-, atau mereka sudah menyadari adanya kudeta sehingga dapat meloloskan diri dengan aman.

Berdasarkan bukti yang ada nampaknya hipotesa kedua lebih kuat, dimana jika merujuk pada fakta bahwa Hakan Fidan –kepala intelejen Turki- terbukti sudah memberitahu jenderal Hulusi Akar satu jam sebelum kudeta dimulai (*News, Turkish Intel Informed Top Generals Hours Before Coup Attempt, Says Army, 2016*), tentunya bukan hal yang mustahil jika Erdogan dan Yildirim juga diberitahu akan hal ini. Tetapi dalam berbagai kesempatan terbuka Erdogan menyangkal dirinya telah mendapatkan informasi dari Hakan Fidan tetapi dari iparnya yang bernama Ziya Ilgen. Itupun ditambah dengan pengakuan Erdogan yang tidak mempercayai

berita Ilgen (*News, No Change In Top Army, Intel Seats After Failed Coup Attempt: Erdoğan, 2016*). Bahkan Erdogan sendiri sempat mengaku tidak bisa menghubungi Hakan Fidan untuk mengkonfirmasi berita tersebut (*Jazeera, 2016*). Akan tetapi lucunya dalam kesempatan yang lain ia mengaku dapat menghubungi Hakan Fidan untuk merencanakan rencana pelariannya dengan selamat dari tempat berlibur ke Istanbul. Meskipun tetap menyangkal mendapat informasi kudeta pertama kali dari Hakan Fidan (*News, Erdoğan Says He Learned Of Coup Attempt From His Brother-In-Law, 2016*).

Dari dua pernyataan yang berbeda ini saja kita sudah dapat menemukan kejanggalan yang signifikan. Bagaimana sang ipar bisa lebih mengetahui kudeta daripada intelejen Turki? Dalam sebuah kesempatan sang ipar menolak untuk bersaksi lebih lanjut dalam komisi yang dibentuk oleh parlemen Turki untuk menginvestigasi kasus kudeta yang gagal. Dia hanya menyatakan melihat adanya tank di jalan (*Minute, 2016*). Jika yang dikatakan ipar benar dan Erdogan tidak percaya bagaimana mungkin ia tiba-tiba merencanakan pelarian dari hotel dengan sigap sehingga lolos dari menit-menit yang menentukan hidupnya tersebut? Jika Fidan adalah saksi kunci dari selamatnya sang presiden mengapa ia tidak mau bersaksi di parlemen.

Uniknya lagi sang pimpinan MIT Hakan Fidan juga tidak diizinkan bersaksi seputar kudeta tersebut oleh AKP –partai pemerintah- (*Minute, 2016*). Lebih jauh jika benar apa yang dikatakan Erdogan bahwa ia kesulitan menghubungi Fidan dalam situasi darurat tersebut seharusnya Fidan dikenakan hukuman yang berat. Apalagi Fidan hanya mengabari Hulusi Akar –pimpinan militer- dan bukannya Erdogan. Akan tetapi ternyata Erdogan tidak menghukum Fidan, hanya sekedar “mencelanya” saja dan tetap mempertahankan posisinya (*News, No Change In Top Army, Intel Seats After Failed Coup Attempt: Erdoğan, 2016*). Sebuah pilihan yang sangat aneh mengingat begitu gembangnya rezim Erdogan menangkap dan memecat berbagai kalangan pasca kudeta yang dituduh terlibat Gulenis.

Hipotesis yang masuk akal disini ialah Erdogan sudah mengetahui rencana kudeta sejak lama. Informasi dari iparnya –jika benar itu pertama kali masuk- bukan informasi mengenai Tank tetapi kode bahwa rencana sudah jalan dan pemberontak sudah masuk perangkap besar rezim Erdogan. Tank di jalan adalah kode dimulainya rencana kudeta kelompok Gulenis dan kode bagi Erdogan untuk bersiap-siap meninggalkan tempat liburannya. Pembicaraan dengan Fidan –jika dianggap sebagai pembicaraan kedua- ialah pembicaraan mengenai kesiapan penerbangannya ke Istanbul dan tentunya konfirmasi mengenai kesiapan kounter kudeta yang dirancang pihaknya.

Sebuah pertanyaan muncul mengapa Hakan Fidan harus memberitahu Hulusi Akar secara terbuka? Hal ini menjadi penting sebab Hulusi Akar tidak termasuk klik dalam Erdogan yang memahani rencana kudeta, bahkan posisinya di militer tergolong bukan loyalis Erdogan. Dengan pemberitaan informasi seputar kudeta kepada Akar diharapkan akan membuat dirinya berubah haluan dan mendukung rezim Erdogan serta memusuhi Gulen. Harapan itu tercapai ketika pasukan pemberontak menahan Akar dan memaksanya untuk berbai'at (sumpah setia) kepada Gulen untuk mendukung kudeta (Sabah, Chief Of Staff Akar Confirms In Testimony Putschists Wanted Him To Speak To Gulen, 2016).

Dengan kata lain Akar adalah “saksi kunci” yang dimanfaatkan Erdogan untuk *memback up* narasi dirinya bahwa Gulen benar-benar melakukan pemberontakan. Posisinya yang netral tentunya membuat kesaksian Akar bahwa Gulen di balik kudeta menjadi pemicu rakyat mendukung serangan balik pemerintah Erdogan pada Gulen.

Perlu ditambahkan selain Erdogan, perdana menteri Yildirim sebagai tangan kanan Erdogan tentu sudah mengantisipasi kudeta dari informasi sebelumnya, sehingga ia memilih cuti. Tentunya ia tidak akan berperan sebagai “hero” layaknya Erdogan yang bagai film laga, dapat lolos dari maut hanya dalam hitungan menit.

Akan tetapi satu hal yang menarik dari penyerangan pemberontak ke parlemen –tempat

kerja Yildirim- membuahkan hasil yang semakin diharapkan oleh rezim Erdogan. Militer kudeta gagal membunuh Yildirim itu satu kegagalan, namun kegagalan yang lebih besar ialah justru dengan serangan ke parlemen terkesan militer ingin menghabisi anggota parlemens secara pandang bulu. Segera saja oposisi memilih berdiri di belakang rezim Erdogan dan tidak memihak militer (Sabah, Turkey's Opposition Parties Take Unified Stance Against Coup Attempt, 2016). Realitas politik ini semakin menguntungkan Erdogan, namun sebaliknya semakin memperlemah posisi pemberontak.

Terkahir pembahasan faseketiga, yakni pasca kudeta. Terkait fase ini ada satu hal yang mengindikasikan bahwa kudeta Turki memang kudeta yang telah ditunggangi, yakni pembersihan “virus” yang dicanangkan oleh Erdogan. Adalah Johannes Hahn, komisioner Eropa yang merasa janggal dengan upaya pembersihan tersebut. Tepatnya pada satu hari pasca kudeta pemerintah Turki telah menangkap lebih dari 3000 tersangka, yang terdiri dari elit militer hingga prajurit. Termasuk pula pemerintah menangkap banyak hakim dan jaksa (Osborne, Turkey Coup Attempt: Government Had List Of Arrests Prepared Before Rebellion, EU Commissioner Says, 2016).

Pertanyaan Hahn sangat masuk akal. Bagaimana mungkin dalam waktu singkat terdeteksi pihak yang terlibat dalam jumlah yang sangat besar, apalagi di luar tubuh militer. Karena aksi yang terjadi pada malam kudeta sama sekali tidak melibatkan atau adanya indikasi pihak non militer. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Erdogan paham akan terjadinya kudeta, dan paham bahwa kudeta tersebut telah direkayasa sehingga tidak akan menyebabkan kerusakan berarti. Ketika aksi tersebut usai, daftar nama orang-orang yang dianggap musuh negara –bisa jadi di luar anggota hizmet pula- segera ditangkap. Jikalau pemerintah Turki tetap menyangkal, maka pilihannya hanya satu yang masuk akal, bahwa penangkapan dilaksanakan secara tidak terencana alias “ngawur”. Siapa saja tanpa alasan yang jelas bisa ditangkap. Jika opsi ini yang dipilih, tentu menjadi sebuah aib yang besar bagaimana Erdogan sang pemimpin

“pro rakyat” seenaknya menangkap rakyatnya tanpa alasan.

PENUTUP

Akankah kudeta gagal 2016 disusul dengan pembersihan “virus” yang sampai saat ini dilakukan Erogan merupakan akhir dari “kegaduhan” politik di Turki? Jawabannya tidak sebab Erdogan belum menguasai sepenuhnya negara Turki. Memang benar kaum sekular sudah melemah, dan saat ini kaum Gulenis Hizmet sedang “dihabisi”, termasuk pula kemungkinan oposisi lain yang tidak terkiat Gulen dapat disingkirkan dengan tuduhan jaringan FETO.

Satu kekuatan yang masih layak diperhitungkan adalah Kurdi, yang hingga kini menjadi duri dalam daging bagi setiap rezim yang memerintah di Turki sejak masa Ataturk. Terlebih lagi dengan perkembangan kondisi Suriah yang memungkinkan kaum Kurdi mendapatkan tambahan kekuatan dari kaum Kurdi Suriah yang notabene memiliki persenjataan kuat pemberian AS sebagai bagian dari aliansi melawan ISIS.

Tidak hanya Kurdi, sejauh mana Erogan tidak mengulangi kesalahan pendahulunya rezim militer yang faktanya tidak bisa menghapus *parallel state* sampai tuntas? Apakah mereka dapat bangkit dengan kekuatan baru, misal bersekutu dengan kalangan sekuler untuk membentuk neo Ergenekon atau neo Sledgehammer? Tentu hal ini meskipun kecil kemungkinannya dalam waktu dekat, namun bukan berarti tidak mungkin sama sekali. Sehingga sulit untuk mengatakan “kegaduhan” politik sebagai bagian dari upaya konsolidasi rezim neo Ataturk akan berakhir dengan kudeta gagal tersebut. Sangat mungkin berbagai turbulensi lain dapat terjadi, tentunya sejauh mana rezim Erdogan mampu mengantisipasinya.

PUSTAKA ACUAN

A Changing Turkey: The Challenge to Europe and the United States 2000 Washington D.C. Brookings Institution Press

Adam, A. W. (2009). *Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku Dan Peristiwa*. Jakarta: Kompas.

Amsterdam, R. R. (2016). *Why should Turkish cleric Fethullah Gülen operate charter schools on U.S. Military bases?* Retrieved from <http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/274675-why-should-turkish-cleric-fethullah-gulen-operate-charter>

ANALYSIS: Turkey Watches Death Throes Of A Faction Facing Its End 2016

Applebay, R. S. (2015). *Dueling Narratives: The Gulenist of The Hizmet Movement*. In M. E. Marty (Ed.), *Hizmet Means Service: Perspectives on an Alternative Path Within Islam*. Oakland: California University Press.

B, J. (2002). *Islamist Mobilization in Turkey: A Study in Vernacular Politics*. Washington D.C.: University of Washington Press.

Balci, B. (2014). *What Are the Consequences of the Split Between Erdogan and Gülen on Turkey's Foreign Policy?* Retrieved from <http://www.foreignpolicyjournal.com/2014/01/17/what-are-the-consequences-of-the-split-between-erdogan-and-gulen-on-turkeys-foreign-policy/>

Basyar, H. M. (2015). *Demokrasi dan Fundamentalisme Islam di Turki*. In I. Kartini (Ed.), *Demokrasi Dan Fundamentalisme Agama*. Yogyakarta: CV Andi & P2P LIPI.

Basyar, M. H. (2015). *Pertarungan dalam Berdemokrasi Politik di Mesri, Turki, dan Israel*. Jakarta: UI Press.

Bayat, A. (2013). *Post-Islamism: The Many Faces of Political Islam*. Oxford: Oxford University Press.

Beck, H. (2010). *The Fateful Alliance: German Conservatives and Nazis in 1933*. New York: Berghahn Books.

Blown Apart By Bombs: Rubble And Debris Fill The Corridors Of Turkey's Parliament Building After It Was Blasted In Coup Attack That Left The Prime Minister's Office In Ruin 2016

Çelik, G. (2010). *The Gülen Movement: Building Social Cohesion Through Dialogue and Education*. Delft: Eburon.

Center, B. P. (2015). *Turkey Transformed: The Origins and Evolution of Authoritarianism and Islamization Under the AKP*. Washington D.C.: Bipartisan Polity Center.

Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto 2008 Jakarta Hasta Mitra & Institut Sejarah Sosial Indonesia

2015 Demokrasi dan Fundamentalisme Islam di Turki Yogyakarta CV Andi & P2P LIPI

Djamaluddin, D. (1998). *Jenderal TNI Anumerta Basoeki Rachmat Dan Supersemar*. Jakarta: Grasindo.

- Djamhari, S. A. (2012). Demokrasi Terpimpin 1959-1965. In T. S. Abdullah (Ed.), *Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis nasional Bagian I: Rekonstruksi dalam Perdebatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Djavadi, A. (2016). *The Gulen Movement's Collision Course With The Turkish State*. Retrieved from <http://www.rferl.org/a/turkey-gulen-erdogan-collision-course/27877830.html>
- Economist, T. (2016). *Most Turks Believe A Secretive Muslim Sect Was Behind The Failed Coup*. Retrieved from <http://www.economist.com/news/europe/21703186-president-erdogan-blames-gulenists-putsch-and-has-launched-massive-purges-most-turks?zid=307&ah=5e80419d1bc9821ebe173f4f0f060a07>
- Elver, H. (2012). *The Headscarf Controversy: Secularism and Freedom of Religion*. Oxford: Oxford University Press.
- Force, T. T. (2014). *Diminishing Press Freedom In Turkey*. Washington D.C.: Rethink Institute.
- Frank, M. J. (2008). *The Holocaust*. New York: Palgrave Macmillan.
- Friedrichs, J. J. (2012). Turkish Islamic Organization: A Comparative Study in Germany, The Netherland, and Turkey. In J. & Cloke (Ed.), *Faith-based Organisations and Exclusion in European Cities*. Bristol: Polity Press.
- Ganbetti, Z. (2016). *Failed Coup Attempt In Turkey: The Victory Of Democracy?* . Retrieved from <https://www.opendemocracy.net/zeynep-gambetti/failed-coup-attempt-in-turkey-victory-of-democracy>
- Gunter, M. M. (2003). *The A to Z of the Kurds*. Lanham: Scarecrow Press.
- Herlambang, W. (2013). *Kekerasan Budaya Pasca 1965*. Serpong: Marjin Kiri.
- Howard, D. A. (2016). *The History of Turkey (2nd Edition)*. California: ABC CLIO.
- Jazeera, A. (2016). *Erdogan: Turkish Democracy Is Not Under Threat*. Retrieved from Al Jazeera: <http://www.aljazeera.com/news/2016/07/erdogan-turkish-democracy-threat-160720200310739.html>
- Kasdi, A. &. (2012). PKI di Balik Gerakan 30 September 1965. In T. S. Abdullah (Ed.), *Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis nasional Bagian I: Rekonstruksi dalam Perdebatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kerr, J. (2003). *Germany, 1919-39*. Oxford: Heinemann.
- Koc, D. (2012). *Strategic Defamation of Fethullah Gülen: English Vs. Turkish*. Lanham: University Press of America.
- Kozok, F. (2016). *Gulen Infiltrated Turkey's Military for Decades, Uçok Says*. Retrieved from Bloomberg: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-02/gulen-infiltrated-turkey-military-for-decades-prosecutor-says>
- Kramer, H. (2000). *A Changing Turkey: The Challenge to Europe and the United States*. Washington D.C.: Brookings Institution Press.
- Louis, F. (2016). *Why We'll Never Get a Full Accounting of Turkey's Failed Coup*. Retrieved from <http://www.haaretz.com/middle-east-news/turkey/.premium-1.731539>
- Minute, T. (2016). *Erdogan's brother-in-law excused from testifying to commission*. Retrieved from Turkish Minute: <https://www.turkishminute.com/2016/10/27/erdogans-brother-law-excused-testifying-commission/>
- News, D. (2016). *Erdogan Says He Learned Of Coup Attempt From His Brother-In-Law*. Retrieved from Daily News: <http://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-says-he-learned-of-coup-attempt-from-his-brother-in-law.aspx?pageID=238&NID=101898&NewsCatID=338>
- News, D. (2016). *No Change In Top Army, Intel Seats After Failed Coup Attempt: Erdogan*. Retrieved from Daily News: <http://www.hurriyetdailynews.com/no-change-in-top-army-intel-seats-after-failed-coup-attempt-erdogan-.aspx?pageID=238&NID=102019&NewsCatID=341>
- News, D. (2016). *Turkish Intel Informed Top Generals Hours Before Coup Attempt, Says Army*. Retrieved from Daily News: <http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-intel-informed-top-generals-hours-before-coup-attempt-says-army.aspx?pageID=238&NID=101805&NewsCatID=341>
- Osborne, S. (2016). *Turkey Coup Attempt: Government Had List Of Arrests Prepared Before Rebellion, EU Commissioner Says*. Retrieved from <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-coup-attempt-erdogan-government-arrests-military-uprising-eu-commissioner-a7142426.html>
- paker, I. A. (2013). Beyond Military Tutelage? Turkish Military Politics and the AKP government. In E. Canan-Sokullu (Ed.), *Debating Security in Turkey: Challenges and Changes in the Twenty-First Century*. Plymouth: Lexington Books.
- Poesponegoro, M. D. (2008). *Sejarah nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Powell, R. (2016). *Shari'ah in the Secular State: Evolving Meanings of Islamic Jurisprudence in Turkey*. Abingdon: Routledge.

- Publications, I. B. (2015). *Recent Economic and Political Developments Yearbook (Volume 1)*. Washington, D.C.: International Business Publications.
- Rossa, J. (2008). *Dalil Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Hasta Mitra & Institut Sejarah Sosial Indonesia.
- Sabah, D. (2016). *Chief Of Staff Akar Confirms In Testimony Putschists Wanted Him To Speak To Gülen*. Retrieved from Daily Sabah: <https://www.dailysabah.com/investigations/2016/07/25/chief-of-staff-akar-confirms-in-testimony-putschists-wanted-him-to-speak-to-gulen>
- Sabah, D. (2015). *Gülenist MP İdris Bal Resigns From The Party He Established*. Retrieved from <https://www.dailysabah.com/politics/2015/03/31/gulenist-mp-idris-bal-resigns-from-the-party-he-established>
- Sabah, D. (2016). *Turkey's Opposition Parties Take Unified Stance Against Coup Attempt*. Retrieved from Daily Sabah: <https://www.dailysabah.com/politics/2016/07/16/turkeys-opposition-parties-take-unified-stance-against-coup-attempt>
- Sejarah nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia* 2008 Jakarta PT Balai Pustaka
- Shaheen, K. (2016). *Turkey Blocks Access To Wikileaks After Erdoğan Party Emails Go Online*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/20/turkey-blocks-access-to-wikileaks-after-erdogan-party-emails-go-online>
- Site, F. G. (2013). *What is Fethullah Gülen's stance on political issues?* Retrieved from Fethullah Gülen's Official Web Site: <http://fgulen.com/en/questions-about-gulen-movement/35668-what-is-fethullah-gulens-stance-on-political-issues>
- Soekanto, S. S. (2016). *Standar Ganda Para Penganjur Demokrasi*. Retrieved from <http://dokter-politik-ui.net/2016/08/standar-ganda-para-penganjur-demokrasi/>
- Susan, R. (2015). *Hitler's Art Thief*. New York: S.t. Martin Press.
- Tempo, T. B. (2015). *Audit Dua Wajah Dipo Nusantara*. Jakarta: KPG.
- Tempo, T. B. (2010). *Syam Lelaki dengan Lima Alias*. Jakarta: KPG.
- The Gulen Movement's Collision Course With The Turkish State* 2016
- The Headscarf Controversy: Secularism and Freedom of Religion* 2012 Oxford Oxford University Press
- The House of Service: The Gulen Movement and Islam's Third Way* 2014 Oxford Oxford University Press
- Tittensor, D. (2014). *The House of Service: The Gulen Movement and Islam's Third Way*. Oxford: Oxford University Press.
- Turkey'S President Erdogan 'Minutes Away From Death' After Coup Plotters Stormed Hotel* 2016
- Wetlesen, N. I. (Ed.). (2010). *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?* Yogyakarta: Kanisius.
- What Are the Consequences of the Split Between Erdogan and Gülen on Turkey's Foreign Policy?* 2014
- WikiLeaks Dumps 'Erdogan Emails' After Turkey's Failed Coup* 2016
- Yücel, S. (2015). *Fethullah Gülen as a Spiritual Leader in a Global Islamic Context*. Retrieved from <https://www.fgulen.com/en/gulen-movement/on-the-movement/the-art-of-coexistence-pioneering-role-of-fethullah-gulen-and-hizmet-movement/48119-fethullah-gulen-as-a-spiritual-leader-in-a-global-islamic-context>

